

Model “Diklastri” Sebagai Alternatif Meningkatkan Mutu Lulusan SMK

Yoto

Jurusan Teknik Mesin- Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang. E-mail: yoto.1718@yahoo.com

Abstract: Link and match policies implemented by SMK with various shapes and models. “Industrial Education Class “ model is one form of manifestation of the link and match policy, which is a model of the implementation of vocational education is arranged and agreed upon by the school and industry. Students receive education in schools in the form of normative subjects, adaptive and basic vocational. While in industry, students working directly in the field carrying out appropriate jobs in the industry. Education system arranged in layers with the block system, planned, implemented, and supervised by the school and industry separately or together. This model combines the learning-oriented vocational training in schools and learning experiences related to working in the industry. Work learning experience provided to students must be in accordance with the program of study and career goals of students. The integration of vocational training in the school and experience working in the industry will form the character of students to be responsible, disciplined and enjoys the work, so that “Industrial Education Class” model able to improve the quality of vocational graduates.

Key Words: industrial class, quality of graduates, SMK

Abstrak: Kebijakan *link and match* dilaksanakan oleh SMK dengan berbagai ragam bentuk dan model. Model “Pendidikan Kelas Industri” adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebijakan *link and match*, yaitu suatu model pelaksanaan pendidikan kejuruan yang diatur dan disepakati oleh sekolah dan industri. Peserta didik menerima pendidikan di sekolah berupa mata pelajaran normatif, adaptif dan dasar kejuruan. Sedangkan di industri peserta didik bekerja langsung di lapangan sesuai pekerjaan yang ada. Sistem pendidikan diatur secara berlapis dengan sistem blok, direncanakan, dilaksanakan dan disupervisi oleh sekolah dan industri secara terpisah atau bersama-sama. Model ini memadukan antara pembelajaran yang berorientasi pada latihan kerja di sekolah dan pengalaman belajar dengan bekerja di industri. Pengalaman belajar dan bekerja yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan program studi dan tujuan karir peserta didik. Keterpaduan pengalaman latihan kerja di sekolah dan bekerja di industri akan membentuk karakter peserta didik untuk bertanggung jawab, disiplin dan menyenangkan pekerjaan, sehingga model “Pendidikan Kelas Industri” mampu meningkatkan mutu lulusan SMK.

Kata kunci: kelas industri, mutu lulusan, SMK

Paradigma pembangunan bidang pendidikan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Terbitnya Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Suryosubroto (2012), salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan pengertian serta dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan melatih agar dapat mengatur urusannya sendiri. Kemauan

berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebar nya. Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber daya yang diperlukan untuk dilibatkan, baik kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti dana, tenaga, dan lain-lain harus dikembangkan.

Agar kemampuan berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat, perlu adanya peningkatan sumber daya

manusia dengan cara memperbaharui dan meluaskan tiga jenis pendidikan masyarakat baik formal, non formal maupun informal (Suryosubroto, 2012). Selanjutnya Suryosubroto menjelaskan bahwa akses yang luas terhadap tiga jenis pendidikan tersebut akan mempercepat tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan bidang pendidikan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (UUSPN No.20/2003 Pasal 4, ayat 6).

Hubungan sekolah dengan masyarakat industri sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan, dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat industri sebagai sumber belajar. Masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Berbagai teknik dan media dapat dilakukan, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah, dan kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua.

Model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat industri merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh oleh SMK, serta pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat industri yang berkepentingan langsung dengan sekolah terkait dengan ketenagakerjaan. Kegiatan operasional pendidikan, kinerja, dan produktivitas sekolah diharapkan semakin efektif, dan efisien.

Dalam PP 29/1990, pendidikan kejuruan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan "pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu". Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Tujuan SMK adalah menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah yang profesional sesuai bidang keahlian yang dipilih, maka kerja sama antara sekolah dengan industri menjadi bagian sistem pendidikan yang sangat penting.

SMK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat industri, karena keduanya saling

membutuhkan dan tergantung. Menurut survey salah satu sekolah di Amerika terdapat 85% industri menawarkan magang kepada siswa (OECD, 2010:35) dengan jalan menjadikan siswa magang harian. Jika sukses, mereka akan magang lebih lama di perusahaan tertentu. Kerjasama antara sekolah dan industri menurut OECD menjadi metode yang efektif dan kokoh untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Produk pendidikan berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat industri.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat menjadi penting, terutama masyarakat industri yang terkait langsung dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh simpati masyarakat industri, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat industri.

Menurut Greinert (1994), terdapat tiga model pendidikan kejuruan: model pasar (*the market model*), model sekolah (*the school model*), dan model sistem ganda (*the dual system model*). Pada model pasar, pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini disebut juga model liberal dan langsung diarahkan pada produksi dan pasar kerja. Sementara model pendidikan sekolah, pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model pendidikan kejuruan ini disebut model birokratik. Sedangkan model sistem ganda merupakan perpaduan dari model pasar dan model sekolah. Pemerintah berperan sebagai pengawas model pasar dalam model ini. Sistem pendidikan ini disebut *dual system*, karena pelaksanaan pendidikan dilakukan di dua tempat, di sekolah dan dunia usaha.

Model kerja sama yang lain adalah antara lembaga pendidikan dan industri yang dikembangkan di Amerika Serikat (Rivai & Murni, 2010; Sonhadji, 2012 dan Greinert, 1994), yaitu disebut model pendidikan kooperatif (*cooperative education*). Pendidikan kooperatif mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) dilindungi oleh undang-undang yang kuat, sehingga baik sekolah maupun industri mempunyai ikatan legal yang harus dipatuhi; (2) mengacu pada pengajaran yang berorientasi pada lapangan kerja (*occupationally oriented instruction*) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan pekerjaan (*work-related learning experience*) di industri; (3)

kegiatan direncanakan dan disupervisi dengan baik; (4) adanya pengaturan waktu antara kedua kegiatan secara berlapis-berulang, yang memungkinkan siswa dapat belajar di sekolah sambil bekerja di industri; (5) pengalaman belajar dan bekerja harus sesuai dengan program studi atau tujuan karier subjek didik; (6) adanya perjanjian pelatihan siswa (*student training agreement*) yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, koordinator/sekolah, dan supervisor/perusahaan; dan (7) siswa yang sedang bekerja diberi upah oleh perusahaan yang bersangkutan (Rivai & Murni, 2010; Sonhadji, 2005 dan Greinert, 1994).

Karakteristik pendidikan kooperatif mirip dengan PSG (Pendidikan Sistem Ganda), tetapi terdapat beberapa perbedaan pokok. Pendidikan Sistem Ganda adalah sistem pendidikan dan pelatihan secara komprehensif oleh sekolah menengah kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan industri (*the dual system model*). PSG dapat berjalan dengan baik jika ada kesepakatan kedua belah pihak antara sekolah dan industri (Djojonegoro, 1994).

Pendidikan kooperatif merupakan sistem pelatihan di industri yang basis pendidikannya tetap di sekolah. PSG merupakan sistem pendidikan secara keseluruhan, dan pendidikan kooperatif merupakan bagian dari sistem pendidikan. Perbedaan pendidikan kooperatif dengan model pendidikan tradisional (*the school model*) terletak pada penyelenggaraan praktik industri yang lebih terencana, bersistem, dan diperkuat oleh undang-undang. Jadi, pendidikan kooperatif terletak di antara pendidikan berbasis sekolah dan PSG.

Terdapat empat model penyelenggaraan pendidikan kejuruan: (1) model pasar, (2) model PSG, (3) model pendidikan kooperatif, dan (4) model sekolah. Selama ini, di Indonesia dilaksanakan model PSG untuk semua SMK dengan berbagai kondisi. Kendala-kendalanya, antara lain: keragaman geografis, keragaman kesiapan dan potensi SMK, keragaman program SMK yang kurang didukung oleh keberadaan industri di daerah yang bersangkutan, kurang efektifnya guru pembimbing dari sekolah, dan instruktur di industri, sulitnya menjalin kerja sama dengan institusi pasangan, serta lemahnya manajemen pelatihan di industri. Agar lebih efisien apabila model PSG tidak harus dilaksanakan untuk semua SMK. Setiap sekolah, dengan pertimbangan Majelis Sekolah, diberi kebebasan untuk memilih salah satu di antara empat model di atas, yaitu: model pasar, model PSG, model pendidikan kooperatif, dan model sekolah, tergantung dari kemampuan, potensi, kesiapan, dan lingkungan masing-masing SMK.

Model yang sesuai menurut penulis dan dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, mampu mencetak tamatan SMK yang siap kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, dan mampu bersaing dalam era global adalah model pendidikan kooperatif (model kerjasama antara sekolah dan industri) yang selanjutnya disebut dengan model "Pendidikan Kelas Industri" disingkat Model "Diklastri". Uraian tentang Model "Pendidikan Kelas Industri" merupakan alternatif meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Kajian diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif, studi kasus di SMK Negeri 1 Singosari Malang.

Fokus penelitian model "Diklastri" sebagai alternatif meningkatkan mutu lulusan di SMK sebagai berikut. (1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan model "Diklastri". (2) Pelaksanaan pendidikan dengan model "Diklastri".

METODE

Pelaksanaan penelitian pendidikan model "Diklastri" di SMK Negeri 1 Singosari Malang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian dipilih berdasarkan purposif sampling, yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat dan industri, wakil kepala sekolah urusan penelitian dan pengembangan, ketua bursa kerja khusus, ketua program keahlian, guru produktif, dan industri mitra. Teknik pengambilan data menggunakan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan selama peneliti berada di lapangan dan setelah pencarian data di lapangan dengan mengacu teori Miles & Huberman (1992), Bogdan & Biklen (1982), serta Lincoln dan Guba (1985). Analisis data dimaksud dengan menggunakan analisis data kasus individu (*individual case*) meliputi: (1) observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*); (2) triangulasi (*triangulation*); (3) diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (4) pengecekan mengenai kecukupan referensi (*referential adequacy checks*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan triangulasi data, maka diperoleh berbagai temuan tentang pelaksanaan pendidikan dengan model "Diklastri" sebagai berikut.

Langkah-Langkah Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Model “Diklastri”

Faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan penduduk usia kerja (angkatan kerja) yang terus meningkat tanpa diiringi peningkatan kompetensi dan keterampilan hanya menambah beban yang harus dipikul bersama oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Sebaliknya, angkatan kerja yang memiliki kompetensi merupakan asset (*human capital*) yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai sektor perekonomian (Priowiryanto, 2001).

Globalisasi yang sedang dan terus berlangsung meningkatkan persaingan di berbagai bidang, termasuk sektor ketenagakerjaan. Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi (*information communication technology/ICT*) dan semakin luasnya jangkauan sarana dan prasarana transportasi mengakibatkan lalu lintas tenaga kerja (*human capital*) antar negara semakin meningkat. Sebagaimana persaingan pada sektor-sektor lainnya, manfaat dari situasi seperti ini akan lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya manusia lebih berkualitas. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) saja tidak cukup, dibutuhkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) tenaga kerja yang akan memasuki persaingan pasar tenaga kerja.

Pendidikan kejuruan menurut Calhoun & Finch (1982) sebagai program pendidikan terorganisasi yang secara langsung berkaitan dengan penyiapan individu memasuki dunia kerja. Selanjutnya Miller (1985) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan persiapan kerja. Di Amerika kebutuhan dan persiapan kerja yang diterima adalah 80% dari semua pemuda yang memasuki pasar kerja tanpa gelar. Mereka membutuhkan pendidikan kejuruan untuk persiapan memasuki dunia kerja. Beban ekonomi dan status sosial disebabkan oleh pengangguran. Hal ini dapat diatasi dengan masuknya para pemuda pada pendidikan kejuruan untuk diajarkan keahlian, pengetahuan, kebiasaan dan sikap sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Dengan latihan kerja di industri para pemuda sudah mempersiapkan diri untuk bekerja, sehingga mereka dapat melaksanakan kerja pasca latihan dengan nyaman tanpa stres karena sudah menjadi tenaga kerja terlatih.

Sekolah kejuruan diselenggarakan untuk menghasilkan tamatan yang segera dapat “dipakai” oleh industri dan dunia usaha, tetapi mata rantai antara produksi tenaga kerja oleh sekolah dan pekerjaannya setelah tamat tidak sesederhana seperti yang diduga. Teorinya, produktivitas suatu masyarakat akan semakin baik bila semakin banyak tempat kerja diduduki oleh orang yang paling sesuai, sehingga ada tuntutan sinkronisasi antara program sekolah dan spektrum keperluan tenaga kerja. Praktiknya masalah yang dihadapi lebih rumit lagi. Sekolah hanya dapat membekali siswa dengan kemampuan dan kemahiran. Untuk sampai pada pekerjaan masih memerlukan dua unsur, yaitu adanya kemauan dan kesempatan.

Menurut Billett (2011) program pendidikan kejuruan harus menyertakan cara-cara untuk membantu individu dalam menentukan pekerjaan yang cocok, dan membangun keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Pendidikan kejuruan biasanya lebih disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja. Kasus dalam sekolah kejuruan jauh lebih rumit karena “produsen” dan “konsumen” tidak di bawah satu atap pengaturan. Pihak “produsen” masih harus mengandalkan perencanaannya pada angka-angka proyeksi yang dalam kenyataannya masih akan bergantung pada perkembangan yang diwarnai oleh situasi pola perekonomian yang berlaku. Tidak semua “kesempatan” yang tersedia bagi tamatan sekolah kejuruan berbentuk “lowongan kerja” yang ditawarkan oleh industri atau dunia usaha yang bermaksud “mempekerjakan” mereka. Ada kalanya “kesempatan” hanya peluang untuk mandiri baik sendiri ataupun berkelompok (Salladien, 1988).

Tujuan pendidikan kejuruan sebagaimana disebutkan di atas, maka SMK Negeri 1 Singosari Malang mencari solusi dalam peningkatan mutu pendidikannya dengan melalui jalinan kerja sama antara sekolah dan industri. Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dengan membentuk model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) (Gambar 1).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data, langkah-langkah yang ditempuh oleh SMK Negeri 1 Singosari Malang dalam mempersiapkan model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) adalah sebagai berikut. (1) Membangun kerja sama yang harmonis dengan industri mitra tempat praktik kerja industri (Prakerin), (2) Merencanakan model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) bersama industri mitra PT. Trakindo Utama Jakarta, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama oleh kedua belak pihak, (3)



Gambar 1. Model Pendidikan Kelas Industri

menyusun kurikulum bersama sesuai kebutuhan industri, (4) menentukan kebutuhan guru/instruktur yang mengajar di sekolah maupun di industri, (5) menentukan sarana dan prasarana praktik, buku ajar dan sumber belajar yang harus disiapkan di sekolah oleh kedua belah pihak, (6) menentukan jadwal pembelajaran di sekolah dan di industri (*on the job training/OJT*), (7) menentukan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan uji kompetensi (Sumber: diolah dari data wawancara, observasi dan dokumen BKK SMK Negeri 1 Singosari Malang, 2013).

Pelaksanaan Pendidikan dengan Model "Diklastri"

Kerja sama (*cooperative*) antara pendidikan kejuruan dan industri merupakan hal yang sangat penting, karena kemitraan mawadahi kepedulian bersama yang masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda. Kemitraan merupakan *simbiosis mutualism*, yaitu pendidikan kejuruan membutuhkan industri, dan industri membutuhkan sekolah kejuruan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing (Sonhadji, 2012).

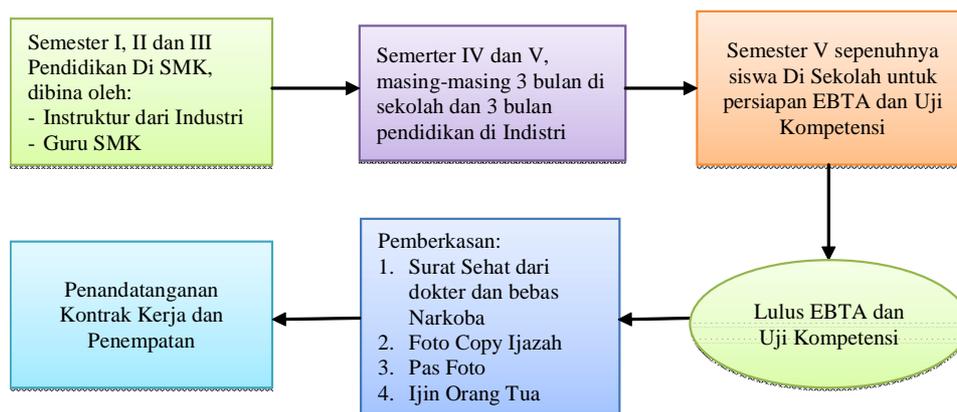
Strategi kerja sama antara pendidikan kejuruan dengan industri menurut Mattews & Norgaad (1984) adalah sebagai berikut. (1) Kontribusi. Antara sekolah kejuruan dan industri saling memberi kontribusi secara sukarela untuk kepentingan kedua belah pihak. Contoh: kegiatan magang siswa memberikan keuntungan bagi industri dengan merekrut tenaga kerja yang berpotensi saat magang, bagi sekolah adalah membantu menghemat biaya pendidikan dan mempercepat penyaluran lulusan. (2) Pembelian dan pertukaran. Sekolah kejuruan dapat membeli produk-produk unggulan dari industri untuk menunjang peningkatan keahlian dan peralatan praktik. Sekolah kejuruan dapat memberikan pelayanan konsultasi dan

pelatihan bagi karyawan industri. (3) Jejaring. Kedua belah pihak membentuk mekanime jejaring untuk memecahkan masalah-masalah antara industri dan sekolah kejuruan. (4) Kerja sama kemitraan. Kedua belah pihak menjalin kerja sama pengelolaan keuangan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan pendidikan kelas industri (*industrial education class*) di SMK Negeri 1 Singosari Malang pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama antara industri dengan sekolah seperti dijelaskan Mattews & Norgaad (1984), bertujuan membantu siswa agar cepat memperoleh pekerjaan setelah selesai pendidikan di SMK, sehingga model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) harus dikelola secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pendidikan kelas industri menyebabkan pembinaan hubungan yang harmonis dengan pihak lain seperti masyarakat dan industri menjadi sangat penting. Tujuan membina hubungan dengan masyarakat adalah untuk menciptakan dan memelihara sikap yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi dengan publik, yaitu dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik (Widjaya, 2008).

Menurut OECD (2010) tujuan dikembangkannya pendidikan kejuruan dengan pola kerja sama (*co-operative*) adalah: (1) menyeimbangkan setiap kemampuan karyawan pada perusahaan dengan pelatihan kejuruan agar setiap perusahaan mempunyai karyawan yang kompeten di bidangnya masing-masing, (2) memenuhi kebutuhan industri agar SMK dapat menyesuaikan kebutuhan dunia industri, (3) pengembangan kemampuan baru, (4) pendidikan kejuruan membantu meningkatkan kemampuan kerja sehingga benar-benar ahli dalam bidangnya, (5) program kejuruan dapat memenuhi semua kebutuhan industri dengan semua keterampilan yang dibutuhkan terdapat dalam kurikulum pendidikan kejuruan.

Hasil pengumpulan data di lapangan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi data di SMK Negeri 1 Singosari Malang, maka dapat dijelaskan pelaksanaan pendidikan kelas industri (*industrial education class*) sebagai berikut. (1) Kelas kerja sama dengan lama pendidikan 3 tahun. (2) Semester I, II, dan III siswa mengikuti pendidikan di sekolah dengan bimbingan pihak sekolah dan industri. (3) Semester IV dan semester V, siswa separuh waktu di industri dan separuh waktu di sekolah; OJT di industri selama 3 bulan dan pendidikan di sekolah selama 3 bulan. (4) Semester VI siswa melaksanakan pembelajaran di sekolah secara penuh untuk persiapan ujian nasional (UN) dan uji kompetensi produktif (UKP). (5) Setelah siswa dinyatakan tamat belajar,



Gambar 2. Pelaksanaan Pendidikan Kelas Industri

siswa direkrut oleh industri untuk dilakukan penempatan dengan memenuhi syarat-syarat; sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dokter termasuk bebas narkoba, mengumpulkan foto copy ijazah, mengisi dan menandatangani perjanjian kerja, mengumpulkan pas foto, dan persyaratan lain yang dibutuhkan (Gambar 2).

Model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disusun bersama antara sekolah dan industri. Kurikulum disusun dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu “Pendekatan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competency Based Curriculum Development Approach*)” dan “Pendekatan Pengembangan Kurikulum Berbasis Luas (*Broad Based Curriculum Development Approach*)” (Depdikbud, 1999). Secara konseptual kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Pendekatan berbasis kompetensi *Competency Based* lebih menitikberatkan bahwa kurikulum berisi bahan pembelajaran yang membekali tamatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang ada di lapangan kerja, sehingga kurikulum berisi kompetensi-kompetensi (terutama keterampilan) yang di dibutuhkan di lapangan kerja. Sebaliknya pendekatan berbasis luas (*Broad Based*) lebih mengutamakan pertimbangan pada pemberian bekal agar lulusan dapat berkembang secara berkelanjutan, sehingga kurikulum berisi kemampuan-kemampuan (terutama intelektual dan emosional) yang memungkinkan lulusan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus.

Selama pembelajaran di sekolah model pendidikan kelas industri, peserta didik Program Studi Teknik Mesin dididik oleh guru-guru dari SMK Negeri 1 Singosari Malang dan instruktur dari industri. Pengajar bidang adaptif dan normatif semua dari sekolah, se-

dangkan pengajar bidang produktif (dasar kejuruan program keahlian) diajar oleh instruktur dari industri dan sebagian dari guru SMK yang sudah mendapatkan *training* dari industri dan/atau guru yang sudah memiliki pengalaman industri. Sedangkan selama siswa melaksanakan *OJT* di industri, sepenuhnya dibimbing oleh instruktur dari industri, sedangkan guru pembimbing sekolah melakukan monitoring secara periodik.

Pelaksanaan uji kompetensi pendidikan model pendidikan kelas industri dilaksanakan di sekolah dan/atau di industri. Naskah uji kompetensi sepenuhnya dibuat oleh pihak industri sebagai calon pengguna lulusan. Siswa yang lulus uji kompetensi dan lulus ujian nasional direkrut oleh industri sebagai tenaga kerja, sedangkan siswa yang belum lulus, gugur sebagai calon tenaga kerja di industri dan harus mengulang pendidikan selama satu tahun di tingkat III yaitu semua mata pelajaran/diklat semester V dan VI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan kelas industri (*industrial education class*) yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Singosari Malang adalah model pendidikan kejuruan yang menyediakan pembelajaran di kelas disertai dengan pembelajaran yang dilaksanakan di industri dengan siswa bekerja langsung di tempat kerja. Pendidikan kelas industri (*industrial education class*) dilaksanakan dengan adanya: (1) kerja sama saling menguntungkan dan saling membutuhkan (*simbiosis mutualism*), (2) pendidikan dirancang oleh sekolah dan industri, (3) rotasi antara belajar di sekolah dan di dunia kerja/industri, (4) perjanjian kerja sama secara tertulis antara kedua belah pihak, (5) model ini

memadukan antara pengajaran yang berorientasi lapangan kerja (*occupationally oriented instruction*) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan kerja (*work related learning experience*) di industri, (6) terjaminnya lapangan kerja bagi lulusan SMK, karena langsung direkrut oleh industri setelah tamat.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut. (1) Model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) dapat diikuti dan dirujuk oleh SMK lain dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan bidang keahlian yang ada di sekolah. (2) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dibuat model "blok" tidak harus berlapis berulang. Misalnya, pendidikan di semester I, II, dan III dilakukan di sekolah, semester IV dan V dilakukan di industri, kemudian semester VI di sekolah persiapan ujian nasional dan uji kompetensi. (3) Pelaksanaan model pendidikan kelas industri (*industrial education class*) perlu mendapatkan perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah, keputusan menteri, atau keputusan bersama menteri.

DAFTAR RUJUKAN

- Billett, Stehen. 2011. *Vocational Education (Purposes, Trsditions and Prospects)*. Griffith University, QLD, Australia: Springer.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.C. 1982. *Qualitatif Research for Education an Introduction to Theory and Methods*. Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, Inc.
- Calhoun, C.C and Finch, A.V. (1982). *Vocational Education: Concepts and Operations* (2nded.). Balmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Djojonegoro, Wardiman. 1994. *Konsep Pendidikan Sitem Ganda*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Dikmenjur.
- Depdikbud. 1999. *Memahami Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Dikmenjur.
- Dwinastiti, Diah. 2013. *Program Kerja Bursa Kerja Khusus (BKK)*. Malang: SMK Negeri 1 Singosari Malang.
- Greinert, W.D. 1994. *Basic Types of Vocational Qualification: The Market Model, the School Model, and the Dual System*. The Institut of Scientific Cooperation (Ed.). *Education*, Vol. 49/50, p. 61-91.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lincoln, Y.S., & Guba, H.G.L. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill, CA: Sage publications, Inc.
- Mathews, J.B. & Norgaard, R. 1984. *Managing the Partnership between Higher Education and Industry*. Boulder, Colorado: National Center for Higher Education Management Systems.
- Miller, M.D. 1985. *Principles and a Philosophy for Vocational Education*. Coloumbus: The Ohio State University.
- Miles, M.B., & Hubermen, A.M. 1992. *Qualitatif Data Analysis*. London: Sage Publication.
- OECD. 2010. *Learning For Jobs*. Synthesis Report of the Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD) Reviews of Vocational Education and Training.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Jakarta: Presiden R.I.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Priowiryanto, G.H. 2001. *Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.
- Rivai, Veithzal & Murni, Sylviana. 2010. *Education Management Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salladien. 1988. *Peranan Program Pendidikan Mengacu pada Dunia Kerja Abad 21 (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 26-29 Juli 1988)*. Bandung: IKIP Bandung.
- Sonhadji, Ahmad. 2012. *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: Penerbit dan Percetakan UM.
- Suryosubroto, B. 2012. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widjaya, H.A.W. 2008. *Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat)*. Jakarta: Bumi Aksara.